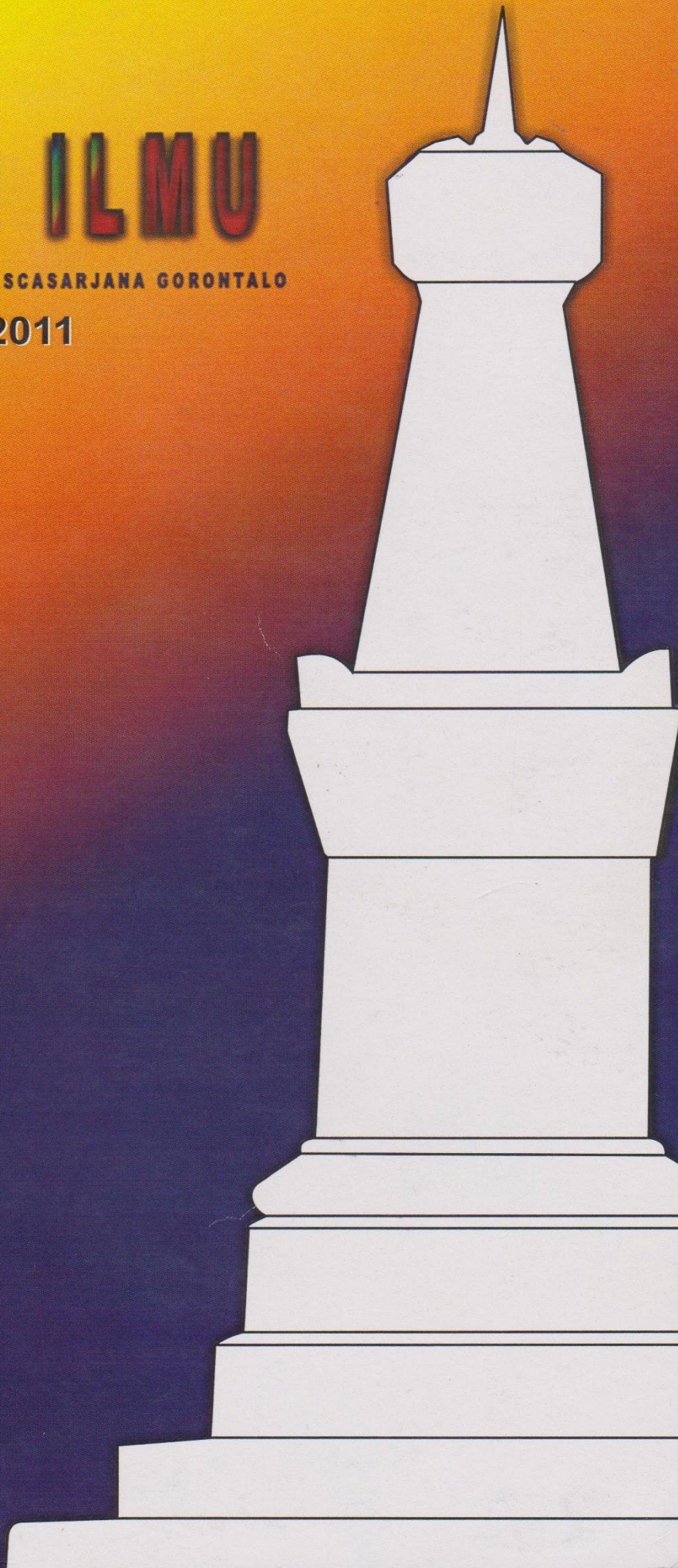


PELANGI ILMU

JURNAL BERKALA FORUM MAHASISWA PASCASARJANA GORONTALO

VOL. 4 No. 1 Januari 2011

ISSN : 1979 - 5262



DAFTAR ISI

Dampak Pemanasan global Dan Upaya penanggulangannya Oleh: Hayatiningsih Gubali	1
Strategi Pengendalian Wereng Batang Coklat (<i>Nilaparvata lugens Stal</i>) Dengan Memanfaatkan Potensi Musuh Alami Oleh: Mohamad Lihawa	11
Gerakan Lingkungan Dalam Perspektif Sosio-Ekologi Oleh: Muhammad Obie	22
Menuju Kehidupan Harmonis Dalam Masyarakat Yang Majemuk (Suatu Pandangan Tentang Pentingnya Pendekatan Multikultur dalam Pendidikan di Indonesia) Oleh: Novianty Djafri	30
Pentingnya Komunikasi Keluarga: (Menelaah Posisi Ibu Antara Menjadi WanitaKarir Dan Sebagai Pencipta Keluarga Berkualitas) Oleh: Sukma Nurilawati Botutihe	48
Peningkatan Hasil Belajar Siswa Melalui ModelPembelajaran <i>Kooperatif</i> <i>Tipe Jigsaw</i> Oleh: Srie Isnawaty Pakaya	64
Membangun Birokrasi Berbasis Kinerja (Studi Kasus Tunjangan Kinerja Daerah Bagi Pegawai Di Provinsi Gorontalo) Oleh: Jusdin Puluhulawa	73
Pandangan Dunia Pengarang Tentang Persoalan Kesenjangan Sosial Dalam Novel 'Laskar Pelangi' Karya Andrea Hirata (Kajian Strukturalisme Genetik) Oleh: Herson Kadir	89
Directed Reading Thinking Activity Technique to Increase Student's Comprehension in Reading Oleh: Magvirah El Walidayni	100
How Languages Are Learned (Revised Edition) Penulis: Patsy M. Lightbown And Nina Spada Penerbit: Oxford University Press.1999. Tebal: 192 halaman Oleh: Sri Rumiyaningsih Luwiti	109

Perbandingan Kompleksitas Waktu Algoritma Insertion Sort, Bi-Partitioned Insertion Sort Dengan Prosedur Select Dan Bi-Partitioned Insertion Sort Tanpa Prosedur Select Oleh: Manda Rohandi	116
Deteksi Jenis Kulit Pada Citra Wajah Dengan Analisis Tekstur Gray Level Co-Occurrence Matrix (GLCM) Oleh: SalmawatyTansa	128
Memahami Relativisme Etika: Usaha Membangun Kebersamaan Dalam Keberagaman Oleh: Munkizul Umam	140
Upaya Menciptakan Proses Peradilan Yang Bersih Sesuai Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Oleh: Fence M. Wantu	149

Membangun Birokrasi Berbasis Kinerja (Studi Kasus Tunjangan Kinerja Daerah Bagi Pegawai Di Provinsi Gorontalo)

Oleh: Jusdin Puluhulawa

Abstract

This study outlines the government's efforts to reform Gorontalo province in the internal bureaucracy to build local government bureaucracy through the implementation of performance-based incentive system of regional performance benefits (TKD). Application of TKD will bring consequences to encourage the spirit, responsibility and job performance of each employee and assessed based on performance. For those employees have a high responsibility on the job and performing well based on the mechanisms and standards that have been determined will get a regional performance incentive allowances (TKD)

The conclusion of this article are: first, establish performance-based bureaucracy through the implementation of systems approach to regional performance incentive allowances (TKD) as an effective instrument to motivate employees to perform well. Second, achievement of the performance of employees from year to year tend to increase. Assuming TKD has a positive impact on employee performance improvement, but from the assessment system and its implementation need to be monitored and evaluated.

Keywords: Bureaucracy, Performance, TKD.

Pendahuluan

Membangun birokrasi berbasis kinerja, dilihat dari prinsip administrasi publik sebenarnya tidak dapat dilepaskan dari persoalan manusia yang hidup dalam suatu organisasi negara. Adapun sumber daya manusia organisasi birokrasi mempunyai ciri yang menunjukkan kedinamisan, perilaku, sifat dan motivasi kerja yang berbeda-beda. Oleh karena itu bila administrasi publik tidak dinamis dan tidak pula mendorong kearah kemajuan, maka orang akan cepat bosan dan kurang respek terhadapnya. Dalam perkembangannya administrasi publik di era tahun 1990-

an lahirilah paradigma baru yang disebut "Post Bureaucratic-Paradigm" oleh Barzelay dan Armajani (1992). Pada saat yang sama muncul juga paradigma yang begitu cepat populer karena bersifat normatif, yaitu: *Reinventing Government* oleh D. Osborne dan T. Gaebler (1992) yang kemudian dioperasionalkan oleh Osborn dan Plastrik (1997). Dalam paradigma *reinventing government*, pemerintahan harus bersifat: (1) *catalytic*; (2) *community owned*; (3) *competitive*; (4) *mission-driven*; (5) *result-oriented*; (6) *customer-driven*; (7) *enterprising*; (8) *anticipatory*; (9) *decentralized*; dan (10) *market oriented*.